

ABSTRAK

Judul Penelitian : Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 (Studi Kasus di Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Asmat)

YERMIAS YAKOBUS LEKRUNA
NIM:2020105015059

Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Studi Kasus di Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Asmat). (Dibimbing oleh Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, Ms dan Dr. Untung Budiarta, M.Si)

Sistem lelang jabatan adalah metode pengisian jabatan struktural yang telah diatur pada tahun 2012 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah.

Jenis penelitian adalah kualitatif yang akan mendeskripsikan data-data empirik yang memuat gejala sosial dan informannya sebanyak tiga belas orang pegawai. Teknik pengumpulan datanya berupa: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan lelang jabatan diperoleh bahwa 1) Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran yang diintervensi oleh politik, komersialisasi jabatan dalam penempatan jabatan yang dilakukan oleh tim sukses Bupati terhadap oknum-oknum pejabat, adanya politik transaksional atau politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran Pemerintah Daerah, dan marginalisasi Baperjakat dalam mekanisme penempatan jabatan di jajaran Pemerintah Daerah justru kebalikan dari mekanisme yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 2) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi politisasi birokrasi yang terjadi di Pemerintah Daerah, antara lain: Kepentingan kekuasaan atau politik kepala daerah, hubungan patron client antara Kepala Daerah dan para birokratnya sebagai bentuk loyalitas birokrat terhadap pemimpinnya dengan imbalan jabatan yang lebih tinggi atau sekedar mengamankan posisi birokrat tersebut dalam jajaran Pemerintah, nuansa nepotisme yang masih kental terasa dalam penempatan jabatan-jabatan dalam lingkungan Pemda, dan menguatnya Neo Feodalisme atau pewarisan kekuasaan yang dilakukan didasarkan untuk memperluas kekuasaannya untuk periode berikutnya.

Kata kunci: Politisasi, Birokrasi, Pemilihan Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

ABSTRACT

Research Title : Politicization of Bureaucracy Post Regional Head Election (Pilkada)(Case Study at Regional Secretariat, Education Office, Health Office, Department of Education)People's Housing, Housing and Land Areas of Asmat Regency)

YERMIAS JAKOBUS LEKRUNA
NIM:2020105015059

Politicization of the Bureaucracy After the Regional Head Election (Pilkada) (Case Studies at the Regional Secretariat, Education Office, Health Office, Public Housing Service, Housing and Land Areas of Asmat Regency). (Supervised by Prof.Dr.Drs.Akbar Silo,Ms and Dr.Untung Budiarta,M.Si)

The job auction system is a method of filling structural positions which has been regulated in 2012 through the Circular Letter of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia No. 16 of 2012 concerning Procedures for Filling Vacant Structural Positions Openly in the Government Environment.

This type of research is qualitative which will describe empirical data containing social phenomena and their information as many as thirteen employees. The data collection techniques are: Observation, interview, and documentation. The data were analyzed descriptively with four stages, namely data collection, reduction, data presentation and conclusion drawing.

As for the results of research and discussion regarding the implementation of the auction of positions, it was found that 1) Massive structural replacement of officials who were intervened by politics, Commercialization of positions in placement of positions carried out by the Regent's success team against unscrupulous officials, the existence of transactional politics or politics of remuneration in the placement of officials in certain positions within the ranks of the Regional Government, and the marginalization of Baperjakat in the mechanism for the placement of positions in the ranks of the Regional Government is precisely the opposite of the mechanism that should be carried out in accordance with the established rules. 2) Interests that influence the politicization of the bureaucracy that occurs in the Regional Government, including: Interests in the power or politics of the regional head, the patron-client relationship between the Regional Head and his bureaucrats as a form of bureaucrats' loyalty to their leaders in exchange for a higher position or simply securing a position. the bureaucrats in the ranks of the Government, the nuances of nepotism are still strong in the placement of positions within the local government, and the strengthening of Neo Feudalism or the inheritance of power that is carried out is based on expanding its power for the next period.

Keywords: Politicization, Bureaucracy, Regional Head Election, Regional Secretariat, Education Office, Health Office, and Public Housing Service, Settlement and Land Areas.